

## PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMB RW) DI KOTA PEKANBARU

Talgia

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

*email: talgia.bts@gmail.com*

Paper Accepted: 05 Juni 2017  
Paper Reviewed: 12-22 Juni 2017  
Paper Edited: 03-15 Juli 2017  
Paper Approved: 20 Juli 2017

### ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the process of Community Empowerment Based on Rukun Warga and maximum on the basis of rill. By using qualitative method by obtaining data from informen accurately and analyzing problems arising from the community empowerment process based on the pillars of the residents in the three urban villages: Simpang Tiga, Tangkerang Labuai and Tangkerang Selatan Sub-districts Bukit Raya Sub-district, Pekanbaru City. Furthermore, community-based empowerment process of harmonious citizens can be concluded to run optimally. The model of community empowerment process based on community-based in this research, which is : enable, empower and protect.

*Key words: Policy, Empowerment and Community Participation*

### PENDAHULUAN

Pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pemberdayaan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, melainkan juga harus mencakup dengan jumlahnya yang banyak dan tersebar seluruh pinggiran kota. Pada seyogianya pemberdayaan mulai dari tingkat unit terkecil sebagai basis dari tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meski telah 71 (tujuh puluh satu) tahun bangsa Indonesia merdeka dengan rezim penguasa sudah silih berganti tidak lepas tiga permasalahan pokok negara Indonesia, yaitu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Masalah ini lah yang belum ditangani oleh pemerintah dengan baik dan maksimal secara universal. Sebagai mana Badan Pusat

Statistik Nasional (BPSN) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukan di setiap provinsi-provinsi di Indonesia berada angka relatif yang kurang baik dari hasil program-program pemberdayaan aktif saat ini.

Tujuan utama *Millenium Developments Goals* (MDGs) secara signifikan mengurangi jumlah penduduk yang miskin dan meningkatkan pendapatan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) serta membangun Indeks Pembangunan Manusia yang baik untuk capaian pada tahun 2015 (*Wikipedia; Tujuan Pembangunan Milenium 2005*).

Program-program *Millenium Developments Goals* (MDGs) mencakup antara lain : bidang pendidikan, pemutus kemiskinan, anti kelaparan, kualitas kesehatan yang baik, lingkungan hidup sanitasi, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan serta ibu hamil.

Tetapi, dengan mitra negara Indonesia dengan MDGs mengalami kenaikan hutang luar negeri. Sebagai mana data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan pada 31 Agustus 2008, jumlah utang Indonesia melambung terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah Rp. 97,7 triliun pada tahun 2009, dan pada tahun 2015 akhir berjumlah Rp. 81,54 triliun untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Negara Indonesia mulai baru menurun pada tahun 2016 menjadi Rp. 66,70 triliun.

Dampak kerja sama antar negara dengan *Millenium Developments Goals* (MDGs) Indonesia mengalami kenaikan/meningkat hutang luar negeri, maka bangsa Indonesia diartikan gagal dalam mencapai tujuan *Millenium Developments Goals* (MDGs) untuk tahun 2015. Bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Riau, yaitu di Kabupaten/Kota menunjukkan menurun dan terjadi juga angka pengangguran yang meningkat, jumlah angka kriminalitas yang tinggi, rendahnya kualitas kesehatan serta tingkat pendidikan rendah.

### Fenomena Penelitian

Unsur-unsur permasalahan yang dilihat di lapangan sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan dari pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) di Kota Pekanbaru.
2. Masih rendahnya tingkat pendidikan yang baik dari pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun warga (PMB RW) di Kota Pekanbaru.
3. Sulitnya mendapatkan jaminan kesehatan yang baik, ditunjukkan dengan tingkat kematian bayi, balita dan ibu pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) di Kota Pekanbaru.
4. Kurangnya lapangan pekerjaan yang layak karena banyak pencari kerja dari pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Rukun Warga (PMB RW) di Kota Pekanbaru.

5. Masih adanya masyarakat yang tempat tinggal atau rumahnya berkategori tidak sehat dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) di Kota Pekanbaru.
6. Masih rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) di Kota Pekanbaru.

### Kerangka Pemikiran

Untuk menanggapi isu permasalahan proses pemberdayaan program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) di kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori *United Nations* (Zubaedi, 2012; 77-79) untuk menggali secara mendalam akar permasalahannya, namun ada juga teori koordinasi dan teori evaluasi kebijakan yang ditambahkan dalam kerangka pikir penelitian. Hal itu menunjukkan sebagai penunjang dalam penelitian sebagai berikut :

1. *Getting to know the local community*. Maksudnya untuk mengetahui karakteristik masyarakat miskin di kecamatan Bukit Raya dengan kecamatan yang lain di kota Pekanbaru supaya petugas program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ada menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di kota Pekanbaru.
2. *Gathering knowledge about the local community*. Maksudnya mengumpulkan informasi fakta dari masyarakat miskin di kecamatan Bukit Raya tentang distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual, dan *custom*, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik secara formal maupun informal masyarakat di kota Pekanbaru.
3. *Identifying the local leaders*. Maksudnya sejauh mana peran dan

dukungan dari pimpinan, yaitu Camat, Bapak Lurah, Bapak Rukun Warga, Bapak Rukun Tetangga, Pendamping PMB RW dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat di kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru.

4. ***Stimulating the community to realize that it has problems.*** Maksudnya untuk menyadarkan masyarakat miskin di kecamatan Bukit Raya bahwa mereka punya kebiasaan yang buruk lingkaran kemiskinan. Masalah-masalah masyarakat di kecamatan Bukit Raya yang perlu dipecahkan dengan metode pendekatan persuasive agar mereka sadar terhadap kebutuhan yang belum dipenuhi di kota Pekanbaru.
5. ***Helping people to identify their problems.*** Bagaimana memberdayakan masyarakat miskin yang ada di kecamatan Bukit Raya agar masyarakat tersebut teransang untuk mendiskusikan masalah yang membelenggu lingkungan mereka dan supaya mencari jalan keluar dari permasalahan yang membelenggu masyarakat secara bersama dengan pihak pelaksana PMB RW tersebut di kota Pekanbaru.
6. ***Helping people to identify their most pressing problems.*** Maksudnya bagaimana masyarakat miskin di kecamatan Bukit Raya supaya mampu mengidentifikasi permasalahan dalam lingkungan hidup paling menekan. Permasalahan ini yang paling urgen di selesaikan PMB RW di kota Pekanbaru.
7. ***Fostering self-confidence.*** Maksudnya tujuan PMB RW pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan Bukit Raya adalah bagaimana membangun rasa percaya diri masyarakat miskin sebagai modal utama masyarakat tersebut untuk berswadaya dilingkungannya di kota Pekanbaru.
8. ***Recognition of strengths and resources.*** Maksudnya masyarakat di kecamatan Bukit Raya diberdayakan dengan PMB RW secara aktif dalam

penanggulang kemiskinan. Aktor-aktor pelaksana PMB RW akan menganalisis skalah tingkat kemiskinan di kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru.

9. ***Recognition of strengths and resources.*** Maksudnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan Bukit Raya dengan PMB RW adalah bagaimana masyarakat miskin menjadi tahu dan mengerti bahwa masyarakat miskin mempunyai kekuatan yang tersembunyi dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk pemecahan permasalahan kemiskinan agar terpenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang layak di kota Pekanbaru.
10. ***Helping people to continue to work on solving their problems.*** Maksudnya pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan Bukit Raya dengan PMB RW suatu bersifat berkesenambungan agar benar-benar lepas dari lingkaran kemiskinan dan PMB RW bekerja untuk memberdayakan masyarakat agar mampu bekerja memecahkan permasalahannya secara berkesenambungan.
11. ***Increasing people's ability for self-help.*** Maksudnya salah satu tujuan dari PMB RW adalah pemberdayaan masyarakat di kecamatan Bukit Raya agar tumbuh menjadi masyarakat yang mandiri atau tujuan yang paling minimal mampu menolong untuk diri sendiri masyarakat di kota Pekanbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemerintah

Menurut Syafii (2011; 5), pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran "an" menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara "pemerintah" dengan "pemerintahan" karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal atau hal ikhwil pemerintahan itu sendiri. Kata pemerintah

itu sendiri, paling sedikit ada empat unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak yang terlibat.
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah.
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat.
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.

### **Kebijakan**

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Robert Eyestone (Winarno, 2011; 20), "secara luas" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan". Selanjutnya kebijakan publik menurut Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan".

### **Koordinasi**

Kata *coordination* berasal dari *co-* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dilihat dari pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak lain (Taliziduhu Ndraha, 2011; 290).

### **Pemberdayaan**

Upaya-upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari sering disebut sebagai upaya "pembangunan". Pendek kata,

pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditunjukkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi (Mardikanto, et.all, 2015; 2).

Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan. Dengan diberdayakan diharapkan dapat memberikan energi dan kekuatan baru untuk dapat mereposisi status yang lemah menjadi setara dan sejajar dengan status yang diharapkan (Sumaryadi, 2013; 57).

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikembangkan dan pengembangannya memerlukan waktu, sumberdaya, pemahaman dan ketekunan. Selain itu partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat secara sukarela, selain juga merupakan gambaran dari pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka (Sumaryadi, 2013; 57).

Menurut Dusseldrop (Mardikanto, et.all, 2015; 84), beragam bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

- (1) Menjadi anggota-anggota kelompok masyarakat;
- (2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- (3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- (4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- (5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- (6) Memanfaatkan hasil keputusan yang dicapai dalam kegiatan masyarakat.

## Evaluasi Kebijakan

Kata ‘evaluasi’, dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai padanan istilah dari ‘penilaian’, yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati (Mardikanto, et.all, 2015; 264)

## PEMBAHASAN

Proses pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) di Kota Pekanbaru berdasar analisis data di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan proses pemberdayaan berbasis masyarakat rukun warga (PMB RW) Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Labuai, dan Tangkerang Selatan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dapat disimpulkan adalah berjalan secara optimal, yakni :
  - a. *Getting to know the local community and Gathering knowlodge about the local community.* Karakteristik masyarakat di kecamatan Bukit Raya yang diberdayakan dengan PMB RW ketahui perbedaan karakteristik terhadap kelurahan yang membedakan masyarakat kelurahan yang satu dengan yang lain.
  - b. *Gathering knowlodge about the local community.* Bahwa pelaksanaan PMB RW dalam mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat di kecamatan Bukit Raya dilakukan dengan valid/lengkap secara formal maupun dari proses PMB RW.
  - c. *Identifying the local leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat di kecamatan Bukit Raya memperoleh dukungan pemimpin baik Camat, Lurah RW, RT maupun semua unsur masyarakat yang terlibat di kecamatan Bukit Raya.
  - d. *Stimulating the community to realize that it has problems.*

Didalam proses PMB RW di kecamatan Bukit Raya telah menyadarkan masyarakat yang terikat terdapat adat kebiasaan dan serta medapat jalan keluar masalah dari PMB RW sebagai upaya pemberdayaan masyarakatnya.

- e. *Helping people to identify their problems.* PMB RW telah Memberdayakan masyarakat di kecamatan Bukit Raya serta menjadi masyarakat yang mandiri dalam menembangkan usaha sendiri.
- f. *Helping people to identify their most pressing problems.* PMB RW di kecamatan Bukit Raya mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan masyarakatnya serta mendapat soslusi dalam pemecahannya.
- g. *Fostering self-confidence.* Telah tercapainya tujuan utama PMB RW di kecamatan Bukit Raya karena membangun rasa percaya diri masyarakat sebagai modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- h. *Deciding on a programs action.* PMB RW telah memprioritaskan masyarakat untuk membangun untuk menjadi masyarakat mandiri terutama masyarakat yang membutuhkannya.
- i. *Recognition of strengths and resources.* PMB RW telah memberikan kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan masyarakat di kecamatan Bukit Raya dan memenuhi kebutuhannya masyarakat maju.
- j. *Helping people to continue to work on solving their problems.* PMB RW di kecamatan Bukit Raya suatu kegiatan yang berkesenambungan memecahkan masalah masyarakatnya secara kontiniu dilaksanakan.
- k. *Increasing people's ability for self-help.* PMB RW telah membuat masyarakat yang mandiri, masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri.

2. Model proses pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) dalam penelitian ini, adalah : *Pertama*, menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat yang akan penting mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki peserta dari program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) di Kecamatan Bukit Raya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat di kecamatan Bukit Raya (*empowering*) peserta dari program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di kecamatan Bukit Raya. Artinya langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya dan, *Ketiga*, melindungi masyarakatnya secara aktif (*protection*), baik secara fisik maupun non fisik artinya disini dituntut peran ketua RT lingkungan kerjanya harus tanggap terhadap yang dibutuhkan masyarakatnya diketiga kelurahan ada di Kecamatan Bukit Raya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Proses pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat yang akan penting mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki peserta dari program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) di Kecamatan Bukit Raya.

Langkah pemberdayaan masyarakat telah diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya.

### Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, direkomendasikan beberapa saran yang mungkin digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam merumuskan proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) di Kecamatan Bukit Raya, yaitu :

1. Bagi pemerintah di kecamatan Bukit Raya terhadap PMB RW supaya segera lebih aktif dalam menjalankan pemberdayaan masyarakatnya dengan memberikan pelatihan maupun pembangunan fisik secara maksimal sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata.
2. Bagi pemerintah Kota Pekanbaru supaya terus menjalankan kebijakan PMB RW yang berpayung hukum kuat serta memberikan pengawasan serta pelatihan-pelatihan bagi setiap kecamatan di kota Pekanbaru dan tetap mengacu pada pemberdayaan fisik maupun non-fisik dimasyarakat kecamatan di kota Pekanbaru.
3. Proses pemberdayaan berbasis masyarakat rukun warga (PMB RW) di Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian di ketiga kelurahan, yaitu Simpang Tiga, Tangkerang Selatan, dan Tangkerang Labuai kecamatan Bukit Raya dari hasil analisis data dilapangan sesuai dengan teori peneliti gunakan peneliti menemukan kelebihan pada kebijakan PMB RW ini.
4. Namun di sisi lain peneliti menemukan kekurangannya dari proses pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di kota Pekanbaru khususnya kecamatan Bukit Raya adalah tidak terjadi keseimbangan meningkatnya

faktor demografi misalnya angka kelahiran yang selalu meningkat pertahunnya. Maka faktor ini harus dikontrol dengan baik, maka sebaik apaun proses kebijakan dari program pemberdayaan masyarakat (PMB RW) akan sulit mencapai pemberdayaan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi Muhclis. (2013). Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi). Bogor: Ghalia Indonesia
- Mardikanto, Totok, Soebianto Poerwoko. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha Taliziduhu. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru I). Jakarta: PT Renika Cipta.
- Sumaryadi I Nyoman. (2013). Sosiologi Pemerintahan (Dari Perspektif, Pemberdayaan dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia), Bogor: Ghalia Indonesia
- Syafiie, I Kencana. (2011). Manajemen Pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Tujuan Pembangunan Milenium, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Milenium](https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium), tahun 2005.
- Winarno Budi. (2011). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi&Revisi Terbaru). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Zubaedi. (2012). Pengembangan Masyarakat (Wacana&Praktik). Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.